

# Membersihkan Mata Pelajaran PPKn dan Agama

Rezy Pradipta

1 June 2014

## Intisari

Di sini kita bahas langkah-langkah efektif yang pada prinsipnya dapat dilakukan untuk memupuk pola pikir dan perilaku yang mencerminkan idealisme Pancasila. Apabila tatanan seperti ini terwujud, implikasinya bisa sangat berarti bagi ketahanan sosial nasional. Langkah yang dimaksud terdiri dari dua bagian: (1) menghapus mata pelajaran PPKn dan agama dari kurikulum akademik, serta (2) mewajibkan kegiatan *social-community service* di berbagai sektor untuk murid-murid sekolah. Pendekatan ini akan mem-*bypass* retorika ideologi teoretis, dan seraya itu menyuntikkan beragam praktik yang luhur/saleh secara laten (tapi sistematis) lewat pembiasaan rutin.

## Merawat Nilai-Nilai Moral Pancasila

Sejak dirumuskan menjelang kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 1945 hingga menjelang akhir abad ke-20, Pancasila telah memainkan peran dan fungsi yang cukup baik sebagai ideologi nasional. Begitulah kapasitas Pancasila di abad ke-20 lalu yang memang merupakan era persaingan dan pertikaian ideologis. Akan tetapi, memasuki abad ke-21 ini, fanatisme ideologis sudah sangat menipis manfaatnya dan bukan lagi prioritas nomor satu dalam upaya menjaga ketahanan nasional. Yang kini layak untuk menjadi prioritas teratas adalah metodologi penciptaan pola perilaku masyarakat yang secara praktis akan menunjang terpeliharanya stabilitas politik dan keadilan sosial-ekonomi. Hal semacam ini adalah bentuk ketahanan nasional yang sebenar-benarnya. Lewat kepentingan pragmatis ini, nilai-nilai moral Pancasila yang terus kita rawat masih tetap berpeluang untuk mendapatkan tempat yang *non-trivial* di abad ke-21. Semua itu tergantung pada langkah pendekatannya.

Untuk kepentingan seperti ini, pendekatan yang dijalankan perlu memiliki orientasi yang sifatnya *behavioral* dan tidak menekankan falsafah. Dengan begitu, melestarikan nilai-nilai moral Pancasila harus diartikan sebagai berikut: menyebarkan pola pikir dan perilaku yang

mewakili sebuah ideal “*Manusia Pancasila*” tanpa menjadikan Pancasila itu sendiri sebagai sebuah payung sosial-politik yang disanjung-sanjung, dan bukan pula sebagai semboyan yang dikumandangkan habis-habisan. Bahkan tidak begitu penting apakah rakyat menyadari bahwa perilaku luhur yang dikerjakan tersebut sebenarnya adalah kristalisasi dari nilai-nilai ideologi negara. Pelabelan itu tidak terlalu penting; yang utama adalah bahwa perbuatan baik dan budi luhur itu menjadi suatu refleks spontan bagi tiap-tiap orang.

Untuk hal-hal yang berkaitan dengan kerohanian-agama, pendekatan yang sama juga sangat dianjurkan. Dengan kata lain, agama sebagai institusi sosial (apalagi alat politik) harus dirobuhkan. Akan tetapi, agama sebagai panduan moral-spiritual bagi tiap individu bisa terus dipelihara. Memang sejatinya agama adalah sesuatu yang sifatnya sangat pribadi. Seseorang tidak masuk Islam, tapi nilai-nilai agama Islam itulah yang meresap ke dalam hati orang tersebut. Seseorang tidak masuk Kristen, tapi nilai-nilai kekristenanlah yang masuk ke dalam diri orang tadi. Demikian juga semestinya dengan agama-agama lain di dunia termasuk Hindu, Yahudi, Budha, Sikh, Khonghucu dsb. Dengan begitu, orang akan lebih mudah untuk fokus pada spiritualitas pribadi/pengembangan akhlak baik; dan mereka tak akan sempat lagi untuk berkutat pada fanatisme “*Tuhan sayalah yang paling benar dan harus dipatuhi*” demi cita-cita supremasi umat semata.

Pendekatan yang selama ini ada, yaitu mata pelajaran PPKn dan agama di sekolah, sangat mengecewakan. Kedua mata pelajaran ini tidak berhasil meng-*induce* perilaku yang pancasilais dan akhlak yang saleh secara sistematis. Sebaliknya, kedua mata pelajaran ini justru jauh lebih manjur dalam menyuburkan retorika ideologis dan/atau retorika agama tanpa dampak *behavioral* yang kolektif. Mata pelajaran PPKn dan agama bisa disingkirkan untuk memberi jalan bagi pendekatan lain yang lebih jitu.

## **Mata Pelajaran PPKn dan Agama di Sekolah**

Dahulu bernama PMP (Pendidikan Moral Pancasila), mata pelajaran PPKn memiliki alokasi sebanyak 2 jam pelajaran dalam seminggu. Tidak jauh berbeda, mata pelajaran agama umumnya juga memiliki alokasi 2 jam pelajaran dalam seminggu. Perlu diingat bahwa menurut standard pendidikan formal di Indonesia, durasi “1 jam pelajaran” adalah 45 menit. Oleh karena itu apabila mata pelajaran PPKn dan agama dihilangkan sama sekali (tak sekadar berganti nama atau dibuatkan suatu versi baru), maka akan tercipta ruang yang bebas untuk digarap di dalam jadwal belajar-mengajar. Banyaknya ruang yang dimaksud di sini adalah 3 jam seminggu (= 12 jam sebulan).

Secara garis besar, isi dari mata pelajaran PPKn dan agama adalah deskripsi mengenai berbagai sikap-perilaku yang dipandang baik/mulia, disertai dengan sejumlah penjelasan atau dalil yang menjadi pembenaran terhadap hal-hal tersebut. Para murid umumnya lantas dievaluasi lewat ujian hapalan-komprehensi dari konsep-konsep kebaikan/ketakwaan tadi, termasuk juga pertanyaan seputar dalil-dalil pendukungnya. Para murid lalu diharapkan untuk mempraktikkan berbagai konsep kebaikan/ketakwaan tersebut. *Masalahnya, harapan itu amat berat untuk terwujud.* Hasil yang diperoleh dari mata pelajaran PPKn dan agama adalah pengetahuan konseptual semata, bukan suatu rangsangan atau umpan untuk beramal saleh dan berbudi pekerti yang baik di dalam kehidupan bermasyarakat. Singkat kata, mata pelajaran PPKn dan agama tidak cukup memuaskan dari segi efek *behavioral*.

Untuk meng-*engineer* sikap-perilaku yang saleh dan pancasilais secara laten, dua mata pelajaran ini bisa dihapus supaya tersedia ruang bagi kegiatan *social-community service* yang akan dilakukan 1 kali setiap bulannya (sehari penuh). Dengan kata lain, prinsip yang digunakan di sini adalah: para murid *jangan dijejali terus* dengan ceramah tentang nilai-nilai ketakwaan dan moralitas, tapi mereka perlu langsung “diceburkan ke kolam sosial” agar mereka akhirnya kepalang basah juga untuk saling menolong sesama manusia secara refleks/spontan. Kebiasaan yang baik ini nantinya akan sulit dihilangkan.

Kegiatan *social-community service* sehari penuh ini diperkirakan akan memakan waktu kurang lebih 8 jam. Alokasi ini tak melebihi jatah 12 jam sebulan yang telah dibebaskan lewat eliminasi mata pelajaran PPKn dan agama. Dengan begitu, secara netto sekitar 4 jam tiap bulannya akan dilepaskan dari jadwal murid di sekolah. Mengacu pada jumlah alokasi waktunya, pendekatan ini  $\sim 30\%$  lebih efisien daripada pelajaran PPKn dan agama. Rincian dari skema kegiatan *social-community service* yang dimaksud akan kita bahas di bawah ini.

Meski pelajaran PPKn dihilangkan, murid sekolah tidak akan lantas tiba-tiba lupa atau tak hapal Pancasila, karena kelima sila tersebut tetap akan dibacakan (dan dilafalkan!) pada saat upacara bendera di sekolah setiap hari Senin. Demikian juga dalam pendidikan agama, pintu untuk mengalirnya wawasan kerohanian masih terbuka lebar melalui berbagai rutinitas seperti khutbah Jumat, kebaktian Minggu, dsb.

## **Mewajibkan Kegiatan *Social-Community Service***

Lewat kegiatan *social-community service*, berbagai budi pekerti yang baik (misalnya: saling menolong, kepekaan sosial, gotong-royong, dsb) di dalam diri murid-murid sekolah dapat ditelurkan dan diasah secara laten. Retorika dan pembenaran ideologis akan kita

*bypass* sama sekali, kecuali kalau memang ada sebagian murid yang menanyakannya karena rasa ingin tahu. Strateginya sederhana: dengan diberikannya peran “pelayan masyarakat” kepada para murid secara rutin-berkala, naluri kemasyarakatan dan kewarganegaraan bisa mulai berkembang di dalam diri para murid selagi mereka masih hijau. Skema pelaksanaannya pun cukup sederhana: secara kolektif, murid-murid sekolah akan dikerahkan sekali setiap bulannya sebagai tenaga “relawan” untuk menyokong berjalannya berbagai fungsi layanan sosial di daerah/komunitas mereka masing-masing.

Agar lapangan penempatan misi bagi para murid dapat dimaksimalkan, skema kegiatan *social-community service* ini akan banyak melibatkan berbagai jenis tugas yang padat karya (i.e. *labor-intensive tasks*). Sektor-sektor seperti pertanian, perkebunan, industri kerajinan tradisional, pemeliharaan fasilitas/aset publik, administrasi umum, ataupun kesehatan dan kesejahteraan masyarakat tentunya bisa menyerap tenaga kerja kolektif massal dari waktu ke waktu untuk menjalankan fungsi/layanan rutin mereka. Akan tetapi, program kerja kolektif yang padat dan produktif saja tentunya tidak cukup. Sebisa mungkin, tugas-tugas yang diberikan dalam kegiatan *social-community service* ini juga harus diarahkan agar para murid dapat berinteraksi secara akrab dengan masyarakat sekitar. Kalaupun tidak dengan anggota masyarakat publik itu sendiri, interaksi interpersonal yang baik antara para murid dengan pemandu/pembimbing/pengawas (dari institusi yang menampung penempatan misi) harus terjadi pada saat kegiatan *social-community service* ini berlangsung.

Sebagai suatu perbandingan, kita bisa tinjau konsep-konsep serupa dari beberapa negara lain. Di Swiss dan Austria, misalnya, generasi muda dapat secara sah memilih untuk menjadi tenaga relawan sosial (selama 2–3 tahun) sebagai suatu alternatif daripada bergabung ke dalam ketentaraan untuk wajib militer. Tugas yang diberikan kepada para tenaga relawan sosial ini antara lain adalah untuk menjadi pengemudi mobil ambulans, atau untuk melayani jasa antar-jemput bagi kalangan manula, dsb. Sementara itu, kabinet pemerintahan Jepang juga pernah mengajukan usul supaya ada kewajiban bagi pelajar untuk melakukan *social-community service*. Tujuan utamanya adalah untuk membentuk naluri kewarganegaraan secara dini serta untuk mengurangi tingkat kenakalan pemuda.

## **Restorasi/Normalisasi Pasca-Penghapusan PPKn**

Biarpun mata pelajaran PPKn tak begitu bernilai dari segi *behavioral effect*, ada sedikit bagian dari PPKn yang masih cukup menjanjikan secara akademik. Contohnya antara lain adalah: gambaran umum mengenai pluralisme dan keanekaragaman budaya di Indonesia, ulasan singkat tentang kerangka hukum formal dan sistem peradilan, serta penjelasan dasar

mengenai ketatanegaraan Republik Indonesia. Meskipun mata pelajaran PPKn dihapuskan, topik-topik semacam ini pada prinsipnya bisa terus dipertahankan dalam ruang lingkup akademik-intelektual. Ada kata pepatah: *don't throw the baby out with the bath water*.

Topik-topik tertentu yang dinilai “*academically-worthy*” tersebut bisa terus diberikan kepada para murid di sekolah. Pasca penghapusan PPKn, hal ini akan dilakukan tanpa memerlukan suatu mata pelajaran khusus. Mata pelajaran IPS reguler dapat menyerap beberapa buah pecahan PPKn yang tersisa ini ke dalam kurikulumnya tanpa menambah jam pelajaran, sehingga topik-topik tadi (meski amat sedikit jumlahnya) akan tetap terpelihara dalam suatu wadah. Namun, perlu diperhatikan bahwa materi pecahan PPKn yang bisa dipelihara dalam mata pelajaran IPS harus memiliki titik berat, misalnya, pada:

- pembahasan atas tugas, kewenangan, dan aturan main bagi berbagai lembaga negara berdasarkan undang-undang dasar (dalam konteks penyelenggaraan negara)
- ulasan tentang permasalahan teknis yang rutin dihadapi oleh berbagai lembaga negara, beserta sejumlah contoh cara penyelesaiannya (yang berhasil dan yang tidak berhasil)
- kajian dan/atau studi kasus mengenai faktor-faktor yang umumnya dijadikan pertimbangan dalam formulasi strategi resolusi konflik (baik domestik maupun luar negeri)

dan tentunya BUKAN materi pelajaran dengan arah/tema, antara lain, seperti:

- menghapuskan butir-butir pengamalan Pancasila dan pasal/ayat undang-undang dasar (apalagi tuntutan untuk menghafal kata-demi-kata)
- doktrin ideologis mengenai sikap/perilaku yang harus dimiliki oleh tiap warga negara (apalagi pengekanan terhadap pola bebas berpikir)
- kata-kata jaminan dan/atau janji mengenai impian kejayaan bangsa ini di muka bumi (apalagi ambisi yang berdasarkan nasionalisme sempit)

Dengan kata lain, kita hanya akan sisakan sejumlah topik esensial (*mis.* ilmu ketatanegaraan) untuk lantas dikaji lebih lanjut di dalam mata pelajaran IPS. Aspek non-esensial lainnya yang mengarah pada retorika moral/ideologis bisa dibiarkan punah.

Inilah bentuk dari proses restorasi/normalisasi kurikulum akademik yang dapat diwujudkan setelah program *social-community service* secara kolektif berjalan dengan cukup stabil. Banyaknya materi teoretis ini amat sangat minimal, tapi ditata khusus dalam ruang lingkup akademik IPS dengan tujuan untuk memancing keingintahuan lebih lanjut bagi para murid yang memiliki inisiatif dan naluri kenegaraan yang kuat/tajam di atas rata-rata.

## Daftar Pustaka

- [1] British Broadcasting Corporation (2013), *Austrians Vote to Keep Compulsory Military Service*, BBC News – Europe, Publication Date: 20 January 2013.  
<http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-21110431>  
(last accessed online 4 May 2014)
- [2] Euronews Channel (2013), *Neutral Austria to Vote on Military Service*, Euronews World Article – English Language, Publication Date: 20 January 2013.  
URL for the archived news articles <http://www.euronews.com/2013/01/20/>  
URL for the news video <http://www.youtube.com/watch?v=kQjdlwTB1JE>  
(last accessed 4 May 2014)
- [3] Kyodo News International (2000), *Panel to Propose Community Service Activities for Kids*, Kyodo News – English, Publication Date: 11 September 2000.  
URL for online copy <http://www.thefreelibrary.com/-a065731720/>  
(last accessed online 4 May 2014)
- [4] J.A. McLellan and J. Youniss (2003), *Two Systems of Youth Service: Determinants of Voluntary and Required Youth Community Service*, Journal of Youth and Adolescence, Vol. 32, No. 1, February 2003, pp. 47–58.
- [5] J. Suryakusuma (2013), *View Point: ‘Kecap’ Religion and the Wisdom of Uncertainty*, The Jakarta Post — Opinion Rubric, Publication Date: 26 June 2013.  
<http://www.thejakartapost.com/paper/2013-06-26/>  
(last accessed 4 May 2014)
- [6] Swiss Broadcasting Corporation (2010), *Community Duty Instead of Military Service*, The Swissinfo News Article, Publication Date: 31 March 2010.  
URL for the news video <http://www.youtube.com/watch?v=e1pZa1jB-Ng>  
(last accessed 4 May 2014)